

MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN “PUBLIC MECHANISM APPROACH” PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO

Rustam Tohopi*, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman 06 Kota Gorontalo, 96128

Abstract

The purpose of this study was to describe the stages and mechanisms of the formulation of development planning policies. In the planning stages and mechanisms, a more in-depth analysis of the process of public involvement in each approach used in the implementation of the development planning system will be examined. Research data collection was carried out through an in-depth interview process with 30 informants at the Regional Development Planning Agency of Gorontalo Regency Based on the research results, increasing the effectiveness of Regional Development planning through the Public Participation Approach or through the Public Mechanism Approach (PM-A). The Public Mechanism Approach emphasizes the importance of the Public Test stage in the formulation of regional development planning policies. This stage is carried out for the achievement of policy objectives in accordance with the exact target. In order not to cause proposals for development programs that are outside the jointly determined planning.

Keywords:

policy formulation model, public test mechanism, development planning

Article history:

Submission October 06 2021

Revised October 20 2021

Accepted November 05 2021

Published December 01 2021

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tahapan dan mekanisme formulasi kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam tahapan dan mekanisme perencanaan akan ditelaah secara lebih mendalam tentang proses pelibatan publik dalam setiap pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui proses wawancara secara mendalam terhadap 30 informan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan efektivitas perencanaan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Partisipasi Publik atau melalui *Public Mechanism Approach* (PM-A). Pendekatan *Public Mechanism Approach* lebih menekankan pada pentingnya tahapan Uji Publik dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Tahapan ini dilakukan untuk pencapaian tujuan kebijakan sesuai dengan sasaran secara tepat. Agar tidak menimbulkan usulan program pembangunan yang diluar perencanaan yang telah ditetapkan bersama.

*Corresponding author

Email:

rustam@ung.ac.id

Kata kunci: Model perumusan kebijakan, mekanisme uji publik, perencanaan pembangunan

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi berbagai kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional (Sasana, H, 2009 ; Nurana, A. C, 2012; Dewanta, A. S, 2016). Kesenjangan sosial telah terjadi akibat sistem birokrasi dan perencanaan yang dijalankan secara sentralistik sehingga menyebabkan output perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada seluruh sektor pembangunan. Pentingnya pelaksanaan perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepentingan publik adalah aspek penting dalam mengatasi berbagai persoalan sosial secara efektif (Setianingsih, B, (2015). Untuk mengatasi hal tersebut maka perumusan kebijakan publik memerlukan sebuah proses yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Perencanaan menurut Artur W Lewis (1963) dalam Sjafrizal (2014:24) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.

Beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat dari beberapa pendekatan yaitu (1) pendekatan proses, bahwa kegiatan adalah merupakan kegiatan yang mengadung tahapan-tahapan sebagai cara atau metode dalam untuk pencapaian tujuan sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh (2) pendekatan nilai, yakni penyusunan perencanaan pembangunan mengandung nilai-nilai sebagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam periode tertentu, (3) pendekatan kelembagaan, bahwa pelaksanaan perencanaan juga perlu mempertimbangkan kemampuan dan sumberdaya pelaksana agar dalam pelaksanaannya dapat dijalankan secara realistis (4) Pendekatan strategis, bahwa perencanaan adalah merupakan langkah-langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas pemenuhannya, (5) pendekatan partisipatif, melibatkan swasta dan masyarakat dalam meningkatkan penggunaan sumberdaya secara produktif sebagaimana pandang (Lewis, 1965), (6) pendekatan sistem, bahwa perencanaan adalah mencakup bidang kehidupan yang luas dan bersifat komprehensi dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. (7) Pendekatan politis, bahwa proses perencanaan agar dapat diterima dan bersifat mengikat secara umum maka perlu ditetapkan dalam sebuah regulasi sesuai dengan tingkatan pemberlakuan, Sjafrizal (2014).

Secara empiris tahapan perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun tahapan-tahapan perencanaan sebagai berikut: : (1) Bahwa pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (2) Dokumen Rencana Strategis Daerah dan masing-masing organisasi perangkat daerah; (3) dokumen

perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musren); (4) penyusunan KUA (5) Penyusunan PPAS; (6) Penyusunan RAPD dan (7) penetapan APBD

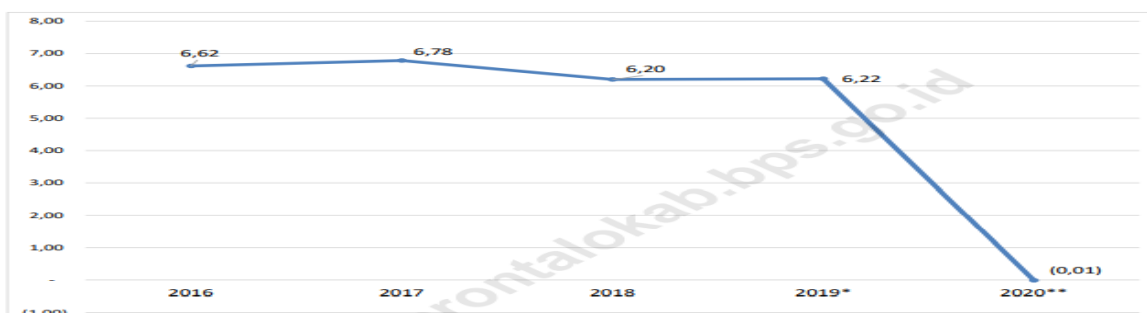
Model perencanaan pembangunan daerah dilakukan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Persoalan mendasar yang biasanya terjadi adalah pada sinergitas program antara kepentingan makro kepentingan skala pemerintahan daerah dan kepentingan mikro dalam skala kebutuhan masyarakat. Sinergitas juga harus dapat dilakukan secara vertikal antara pusat dan pemerintah daerah. Merujuk pada indikator makro perekonomian Kabupaten Gorontalo maka dapat dilihat adanya stagnasi baik dari aspek pertumbuhan ekonomi maupun dari peningkatan PDRB daerah sehingga dampak terhadap pengentasan kemiskinan daerah juga belum menunjukkan adanya keberhasilan yang signifikan. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 1. Perkembangan PDRB Kabupaten Gorontalo

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2016	9, 994,000	7 362,400
2017	10 884,700	7 862,000
2018	11 834,500	8 349,300
2019	12 880,800	8 868,700
2020	13 047,100	8 867,600

Sumber: Kabupaten Gorontalo, 2021

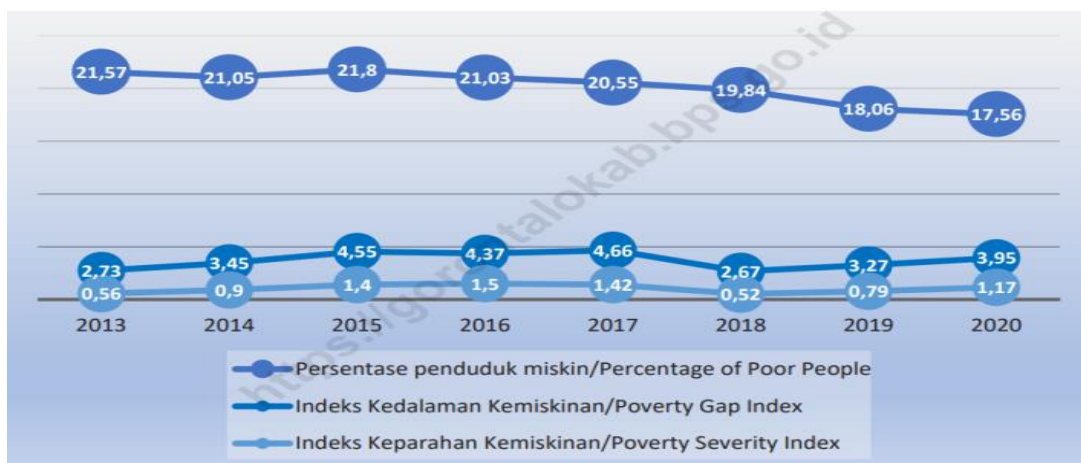
Peningkatan PDRB tersebut diatas dapat disebabkan oleh adanya peningkatan produktifitas masyarakat. Secara makro, Peningkatan PDRB juga dapat disebabkan oleh adanya peningkatan penduduk yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Akan tetapi peningkatan PDRB tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi signifikan justru pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi secara mendalam dan mengalami penurunan pada tahun 2019, hal tersebut ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo
 Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo, 2021

Peningkatan PDRB yang tidak disertai peningkatan pertumbuhan ekonomi secara proporsional dapat menunjukkan trend bahwa peningkatan PDRB tersebut dapat disebabkan oleh peningkatan konsumsi lebih mendominasi dari pada peningkatan produktifitas masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 pertumbuhan hanya 6.62%, angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 6.78 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 6.20% sedangkan tahun 2019 hanya meningkat sebesar 002% menjadi 6.22%.

Peningkatan PDRD yang ditopang oleh peningkatan konsumsi masyarakat sebagai dampak dari peningkatan pertumbuhan penduduk secara kualitatif tidak berdampak pada proses perbaikan ekonomi masyarakat, terutama yang hidup dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan data kemiskinan Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan dengan peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi belum berdampak secara signifikan sebagaimana tampak sebagai berikut :



Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo
Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo, 2021

Berdasarkan data tersebut diatas maka Peningkatan PDRB yang meningkat pertahunnya diatas rata-rata 10% akan tetapi peningkatan tersebut hanya mampu menurunkan angka kemiskinan hanya rata-rata diatas 0.6%, menunjukkan bahwa kualitas peningkatan ekonomi daerah terutama dari indikator makro ekonomi belum secara signifikan dapat mengatasi angka kemiskinan. Dengan demikian maka kinerja ekonomi makro secara ekonomi perlu mendapatkan perhatian yang serius terutama dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan secara tepat dan sinergi dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara mendasar.

Beberapa uraian tersebut, maka secara makro dapat dilihat bahwa prorses peningkatan pelayanan publik dalam upaya pemenuhan kebutuhan publik belum berjalan sebagaimana diharapkan. Sementara itu secara empiris juga berdasarkan penuturan beberapa informan tentang proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan sebagaimana dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yakni dengan proses pelibatan masyarakat melalui pelaksanaan Musrenbangda.

Beberapa pencapaian keberhasilan pembangunan seperti pada tabel diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan belum secara maksimal dilaksanakan. Dari obeservasi yang dilakukan persoalan utama yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat adalah pada aspek pemenuhan kebutuhan-kebutuhan melalui perumusan program perencanaan pembangunan.

Rendahnya kualitas perencanaan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; (1) Rendahnya kapasistas pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah (Krisnanto, W., & Suryawati, N, 2019) yang disebabkan oleh sering terjadinya mutasi pegawai di lingkungan OPD (2) rendahnya partisipasi publik yang ditandai dengan perilaku masyarakat yang enggan menghadiri kegiatan Musrenbangda (Djoeffan, S. H, 2002; Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. 2014; Kurnia, R. S, 2017. Pendekatan perencanan masih bersifat top down dengan pendekatan penerapan birokrasi secara ketat melalui aturan-aturan

Hasil penelitian oleh Setianingsih, Setyowati & Siswidiyanto (2015) dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan serta menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu aspek penting bagi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah terdapatnya badan atau satuan kerja yang baik serta adanya sistem informasi yang mendukung. Aplikasi berbasis sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah Simrenda. Keberadaan Simrenda diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, sehingga realisasi pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya hasil penelitian oleh Nasution A, (2007) dengan judul Perencanaan Partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang RPJMD lebih banyak dilakukan secara formalitas dan tidak semua komponen stakeholders dilibatkan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut. Sedangkan penelitian oleh Ra'is, Setyawan, Dimus (2020). dengan judul Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu. Hasil penelitian perencanaan pembangunan daerah di Kota Batu sudah efektif. Walaupun begitu, masih ada beberapa faktor penghambat yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Batu, yaitu program kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMD atau visi-misi kepala daerah, sistem ditingkat lokal pemerintahan daerah yang belum tersinkronisasi secara maksimal, sehingga proses input data masih perlu berulang-ulang. Faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi antar OPD. Oleh sebab itu diperlukan konsistensi dari semua elemen yang terlibat dalam perencanaan. Komitmen dari kepala daerah, kepala OPD dan elemen lain yang terlibat dalam proses perencanaan harus diperkuat.

Beberapa faktor tersebut dapat mempegaruhi kualitas perencanaan pembangunan yang ditandai oleh kurang efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan pembangunan.

Efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Kurangnya responsifitas pemerintah dapat mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik, kurangnya motivasi masyarakat dan rendahnya responsibilitas pemerintah terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dapat mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Ketiga aspek tersebut dapat mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mendalami proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya relevansi perencanaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana tahapan dan mekanisme formulasi kebijakan perencanaan pembangunan. Lebih spesifik bahwa dalam tahapan dan mekanisme perencanaan telah dikaji dan diuraikan secara lebih mendalam tentang proses pelibatan publik dalam setiap pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo. Dengan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan dapat dilaksanakan dengan analisis mendalam terhadap penelitian yang diungkapkan.

Menurut Miles And Huberman (1992) bahwa secara garis analisis data dalam penelitian kualitatif kedalam tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Oleh karena itu dalam penelitian itu dilakukan proses reduksi data sebagai proses kodifikasi, penyajian data dan verifikasi atau pengecekan keabsahan dasar. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dari data lapangan dituangkan dalam laporan yang lengkap dimana data laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk pilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya dan reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudian dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan strategi pelayanan data kedalam bentuk tertentu sehingga kelihatan jenis sosoknya lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah dan disajikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk tampilan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi atau ditemui, termasuk kesimpulan sementara diperoleh pada waktu direduksi.

3. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagai tindak lanjut dari penelitian maka perlu diadakan pengujian data yakni uji keabsahan data, ada empat teknik pengujian keabsahan data akan tetapi peneliti hanya menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan kriteria untuk menilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan dilapangan, artinya hasil penelitian harus dapat dipercaya dan teruji kebenarannya, peneliti adalah merupakan instrumen dalam penelitian kualitatif sehingga memungkinkan terjadi informasi bias.

Untuk memperoleh data valid pengecekan data dilakukan melalui (a) Pengamatan terus menerus (b) Triangulasi (c) Pengecekan atas kecukupan referensi. Teknik pengamatan terus menerus digunakan untuk memahami dan menggali lebih dalam fokus masalah penelitian, peneliti melakukan pengamatan secara terus menerus tentang relevansi sistem perencanaan pembangunan daerah dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo.

Pengecekan keabsahan data melalui teknik triangulasi menggunakan sumber data dan metode. Dimana sumber data yaitu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari salah satu sumber dengan sumber lain sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengecek kembali keabsahan data dengan berulang-ulang kali, data yang diperoleh dari hasil wawancara dicek lagi dengan observasi atau sebaliknya.

4. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna, data yang diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, bebobot dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode antara lain: (a) Mengecek representatif atau keterwakilan (b) mengecek data dari pengaruh (c) Mengecek data dari pengaruh peneliti (d) Melakukan pembobotan bukti dari sumber

data-data yang dapat dipercaya (e) Membuat perbandingan atau mengkontraskan data (f) Menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif.

Setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan temuan baru yang belum pernah ada, temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek agar menjadi jelas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo

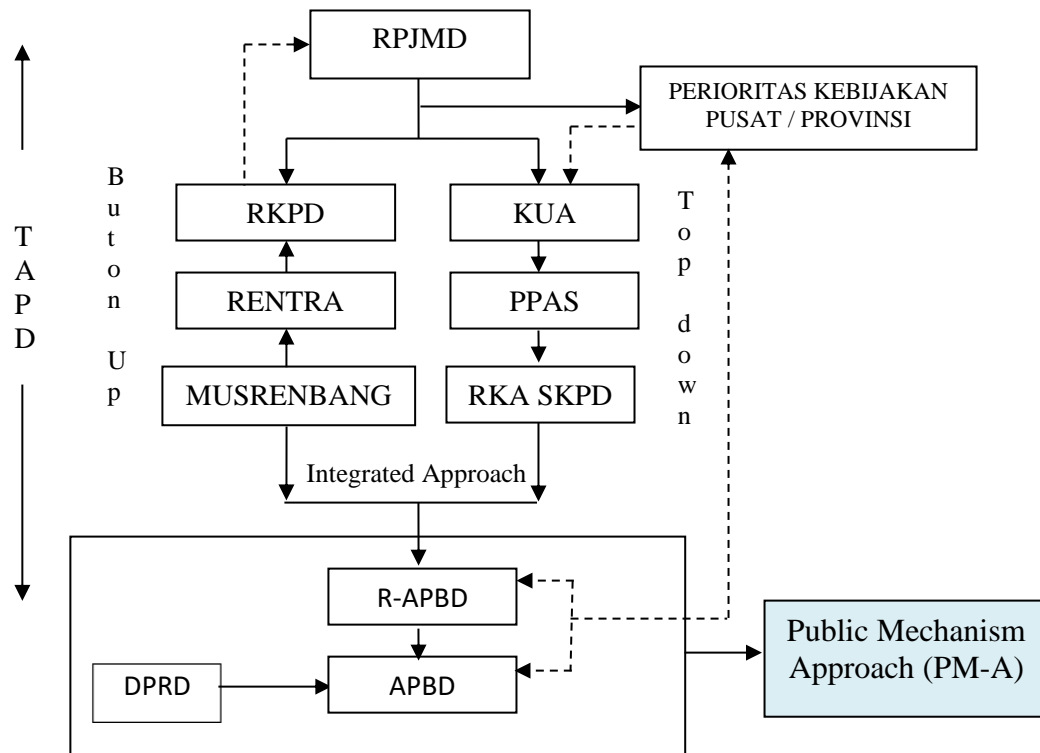
Dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya sinkronisasi program antara dokumen perencanaan secara struktural dan secara sektoral (Yudi, A. 2015; Kurniansyah, D, 2018; Revisa, N. (2019). Proses sinkronisasi tersebut dapat dilihat dari tahapan-tahapan perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa proses perencanaan pembangunan tidak lepas dari Visi dan Misi dari setiap pemerintah yang dilegitimasi untuk menjalankan sistem pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Secara empiris bahwa keseluruhan model perencanaan pembangunan akan mengacu pada visi dan misi dari setiap pemerintahan yang terpilih. Dilain pihak sistem perencanaan pembangunan diatur dalam ketentuan secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Tahapan selanjutnya berdasarkan ketentuan regulasi tersebut maka proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui berbagai tahapan. Yakni proses musrenbang, yang dilakukan dari muswarah ditingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan musrenbangnas. Dari proses musrenbang tersebut diharapkan akan ditentukan pilihan-pilihan kegiatan yang akan dijalankan dalam satu tahun anggaran pembangunan.

Tahapan akhir dari proses formulasi kebijakan pembangunan tersebut yakni adalah proses penetapan program serta anggaran pembangunan melalui pembahasan oleh lembaga eksekutif dan legislatif daerah dalam menetapkan RAPBN menjadi APBN yang akan dijalankan oleh pemerintah.

2. Mekanisme Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gorontalo

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah Di Kabupaten Gorontalo dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Adapun mekanisme tersebut dapat dideskripsikan dalam gambar 3, sebagai berikut:



Gambar 3. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Beberapa Pendekatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gorontalo

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik melalui pelaksanaan pembangunan adalah menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Berdasarkan studi analisis kebijakan publik menyebutkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat tergantung pada perumusan kebijakan (Ismail, M. H., & Sofwani, A., 2016; Wahab, S. A, 2021; Widodo, J, 2021). Perumusan kebijakan publik dalam penetapan program dan kegiatan pembangunan yang selama ini dijalankan melalui pendekatan *Top Down Approach, Bottom Up dan Integrated Approach* masih memungkinkan adanya perubahan-perubahan program pembangunan pada tahap penetapan rumusan kebijakan antara eksekutif dan legislatif, dan memungkinkan munculnya program kerja dadakan atau program-program yang diusulkan diluar alur sistem perencanaan pembangunan (Renstra).

2. Model pengembangan model formulasi kebijakan publik (PMA)

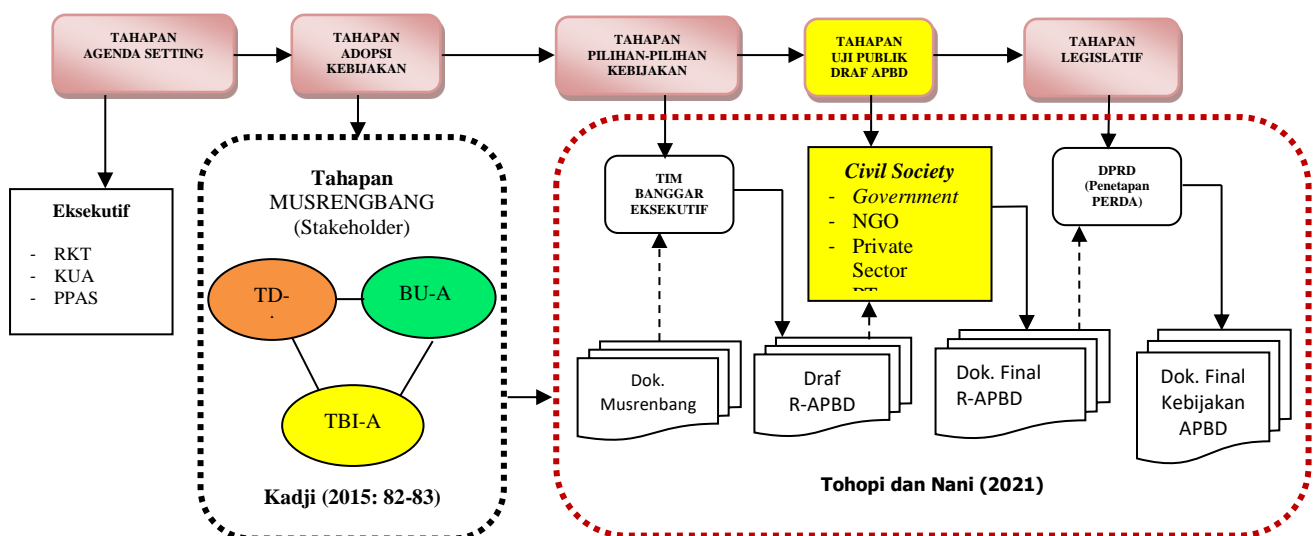
Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, dirumuskan satu pendekatan baru dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pendekatan perencanaan pembangunan tersebut dinamakan dengan "*Public Mechanism Approach (PM-A)*", yakni satu pendekatan yang mengedepankan kepentingan publik dalam penetapan pilihan-pilihan dalam perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan. Konsep dasar tentang *Public Mechanism*

Approach (PM-A) tersebut secara konseptual didasarkan pada paradigma pembangunan sebagai berikut :

- a) Bahwa tujuan dasar pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945
- b) Bahwa secara konstitusi, kedaulatan berada ditangan rakyat sehingga rakyat berhak mendapatkan informasi dan bentuk layanan yang berkualitas, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek tetapi juga adalah subyek pembangunan
- c) Bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik yang dijalankan melalui program-program pembangunan dapat dijalankan secara efektif melalui proses pelibatan publik secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil alternatif pengembangan model dan pendekatan dalam formulasi perencanaan pembangunan maka konsep *Public Mechanism Approach (PM-A)* dalam perumuskan formulasi kebijakan publik dapat dirumuskan dalam model sebagai berikut:

Model Perumusan Kebijakan Publik “Public Mechanism Approach”
 (Sistem Perumusan Formulasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah)



Gambar 4. Pengembangan Penelitian melalui PM-Approach

Keterangan Gambar :

1. TD-A adalah *Top Down Approach*
2. BU-A adalah *Bottom Up Approach*
3. TBI adalah *Top Down, Bottom Up dan Integrated Approach*

Pendekatan ini dirumuskan untuk memaksimalkan proses perumusan kebijakan dari aspek kepentingan publik. Dengan melakukan beberapa pendekatan sebelumnya seperti *Top-down, Bottom Up dan Integrated Approach* (Kadji, 2015). Ketiga pendekatan tersebut secara empiris masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan karena dari setiap

formulasi kebijakan pembangunan senantiasa kepentingan publik terabaikan. Atau pada tahapan akhir penetapan kebijakan pembangunan kepentingan kelompok mendominasi kepentingan publik dalam setiap penetapan APBD.

Dalam tahap akhir penetapan program dan kegiatan pembangunan (APBD) adanya celah yang dapat memungkinkan munculnya penetapan program-program dadakan (program siluman) atau program-program yang diusulkan diluar alur sistem perencanaan pembangunan. Sehingga dalam pembahasan RAPBD kerap kali adanya penetapan program dan kegiatan yang merepresentasi perwujudan kepentingan kelompok dari pada pemenuhan kepentingan publik secara substantif. Kelompok yang dimaksud berupa kepentingan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintahan yang sebelumnya tidak diusulkan melalui mekanisme musrenbang.

Pendekatan "*Public Mechanism Approach*" (PM-A) memperkenalkan adanya satu tahapan perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan yang disebut sebagai tahapan "Uji Publik". Tahapan uji publik ini dapat mengkonfirmasi bahwa penetapan program dan kegiatan pembangunan pada tahapan finalisasi formulasi kebijakan (APBD), tidak dapat dilakukan adanya revisi yang mendasar dengan mengabaikan kepentingan publik oleh para pengambil kebijakan. Dengan demikian maka dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dihindari adanya upaya-upaya dari kepentingan tertentu untuk memasukan adanya program-program siluman kedalam RAPBD/APBD.

Dalam konsep PM-A ini para aktor kebijakan diharuskan untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pihak legislatif lebih memaksimalkan tugas dan fungsi dalam melakukan assesment anggaran dan program-program yang telah diusulkan melalui tahapan dan mekanisme perencanaan. Sedangkan pihak eksekutif lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai implementor dari setiap kebijakan – kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan dalam proses formulasi yang dilakukan melalui tahapan agenda setting sebelumnya dalam musrenbang.

Dalam pendekatan PM-A ini, tahapan uji publik menjadi salah satu tahapan yang penting dalam sistem perencanaan pembangunan. Tahapan Uji public adalah satu tahapan yang sistemik dalam formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. pada tahapan ini dapat melibatkan publik secara menyeluruh (stakholder) baik dari Perguruan Tinggi, LSM dan perwakilan Organisasi kemasyarakatan yang berkompeten dalam proses peningkatan pelayanan publik. Tahapan Uji Publik dilakukan dalam finalisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan (penetapan R-APBD atau APBD).

Pentingnya Uji Publik dalam Model Public Mechanism Approach (PMA)

Tahapan uji publik adalah tahapan akhir sebelum "R-APBN" ditetapkan Menjadi APBN. Pentingnya Tahapan Uji Publik adalah untuk memastikan bahwa Formulasi kebijakan perencanaan pembangunan didasarkan pada dokumen perencanaan

pembangunan yang didasarkan pada rencana perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas).

Uji publik dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan sebagai proses formulasi kebijakan dilakukan berdasarkan nilai-nilai paradigma administrasi Public yang menerapkan prinsip *New Public Service* (NPS). Konsep NPS ini mengedepankan nilai-nilai transparansi, responsibility, Kualitas pelayanan dan akuntabilitas publik secara kongkrit dalam mewujudkan pelayanan publik secara nyata.

Konsep PM-A juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa pilihan-pilihan yang ditetapkan dalam program sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik secara kongkrit. Dengan demikian maka public diberikan kesempatan dalam menilai dan mengassistensi keseluruhan kegiatan dan pilihan-pilihan program dan kegiatan yang nantinya ditetapkan sebagai kebijakan pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah.

Adapun bentuk pelaksanaan tahapan Uji Publik dapat berupa Seminar, Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi yang menghadirkan seluruh stakeholder dan termasuk media masa yang berkemungkinan dengan proses pelaksanaan uji publik dimaksud. Out put yang dihasilkan dari hasil uji publik tersebut dapat berupa **"komitmen bersama"** dalam melahirkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, dan akuntabel.

PENUTUP

Perumusan kebijakan publik dalam penetapan program dan kegiatan pembangunan yang selama ini dijalankan melalui pendekatan *Top Down Approach*, *Bottom Up* dan *Integrated Approach* masih memungkinkan perumusan kebijakan hanya berdasarkan pada unsur kepentingan oleh para elite kekuasaan melalui proses kompromi oleh eksekutif dan legislatif sehingga sering muncul adanya program yang bersifat dadakan dalam rumusan kebijakan pembangunan tanpa mengacu pada hasil agenda setting dari bawah, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan perlu menerapkan model perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan model *"Public Mechanism Approach"*, yakni satu model yang memandang bahwa dalam proses perumusan kebijakan memerlukan adanya tahapan uji public dalam bentuk kegiatan konsultasi public terhadap penetapan rumusan-rumusan kebijakan menjadi sebuah peraturan daerah.

REFERENSI

- Adi Yanuar Fadillah, Nurna Aziza, L. M. (2020). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 10(1), 63–78. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/179727>
- Anggun Ciptasari Nurana; Lutfi Muta'ali. (2012). Analisis dampak kebijakan otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan wilayah di kawasan Ciayumajakuning. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(3). <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/82/80>
- Awan Setya Dewanta. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. *UNISIA*, 52(3), 325–329. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12>
- Djoeffan, S. H. (2002). Strategi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 18(1), 54–77. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/63>
- Hadi Suroso, Abdul Hakim, I. N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(1), 7–15. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/290/249>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik-Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (Agus Eko Sujianto (Ed.)). Cahaya ABADI. <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/3/89/formulasi-dan-implementasi-kebijakan-publik-kepeminana-dan-perilaku-birokrasi-dalam-fakta-realitas.html>
- Kurnia, R. S. (2017). Pengaruh pelaksanaan good governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kabupaten Bandung. *Digital Library UIN Sunan Gunung Jati*. http://digilib.uinsgd.ac.id/32516/2/2_Abstrak.pdf
- Kurniansyah, D. (2018). Tinjauan Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Cimahi Tahun 2017. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 262-275. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/jpi.v3i2.1679>
- Miles and Huberman. (1992). *Analisis data kualitatif (buku sumber tentang metode metode baru) penerjemah, Tjetjep Rohendi*. (T. Rohendi (Ed.)). Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Nasution, A. (2007). Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). *Repositori Intitusi Universitas Sumatera Utara*. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/42169/037024063.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sasana, H. (2009). No Title Analisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota provinsi jawa tengah dalam era desentralisasi fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 16(1), 50–69. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/315>

- Setianingsih, B. (2015). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs)(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11), 1930–1936. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1071>
- Sholih Muadi; Ismail; Ahmad Sofwani. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224. <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078>
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (Ed. 1, Cet). PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (1st ed.). Bumi Aksara. <http://pustakamaya.lan.go.id/opac/detail-opac?id=1569>
- Wahju Krisnanto, N. S. (2019). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(3), 481-489. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v21i3>
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik : konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik* (2nd ed.). Banyumedia Publishing. http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=3959
- Yudi, A. (2015). Sinkronisasi Perencanaan Ruang (Spatial Planning) Dengan Perencanaan Pembangunan (Sectoral Planning)(Studi Kasus: Identifikasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kewilayahan Dengan Pembangunan Sektor Infrastruktur Di Kota Bandung). *Universitas Islam Bandung Repository*.